BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia, berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik tahun 2017 Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 262 juta jiwa, memiliki 17.504 pulau, dan yang berpenghuni sekitar 2.342 pulau terbagi menjadi 34 provinsi. Populasi penduduk sebesar ini Indonesia memiliki banyak persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan, kemacetan, dan berbagai masalah lainya.

Kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Kemiskinan seyogyanya digambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti, sandang, pangan dan papan.

Kurangnya pendapatan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini disebabkan orang miskin tidak memiliki biaya untuk mengakses berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan telah

membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang memadai, mengakses kesehatan yang terjamin dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 70,81 berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 2017.

Banyak sekali penduduk Indonesia yang mengalami keadaan miskin atau bahkan sangat miskin, menurut Badan Pusat Statitik nasional pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26, 58 juta orang (10,12 persen), yang membuat mereka tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua Negara di Dunia. Kemiskinan tidak hanya berada di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju. Masalah kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian. Sepertiga penduduk di dunia masih hidup dalam kemiskinan hal tersebut sesuai dengan kriteria dari Bank Dunia bahwa klasifikasi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah menggunakan pendapatan per kapita sebesar US$370 Amerika sebagai tolak ukurnya.

Peran Pemerintah di Indonesia yang dapat menentukan maju atau mundurnya suatu Negara. Pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada masing-masing Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengenai Otonomi Daerah.

Negara berkewajiban untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang merupakan pedoman bagi penduduk Indonesia, namun pada kenyataanya sangat belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang.

Dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial pemerintah Indonesia mulai Bulan Juli Tahun 2007 melaksanakan program keluarga harapan yang di *launching* secara resmi oleh Menteri Sosial dan Pemerintahan Daerah pada tanggal 25 juli 2007 di Gorontalo. Berdasarkan sumber buku Pedoman Umum PKH 2009 yang menjelaskan bahwa pada tahap awal program keluarga harapan dilaksanakan di tujuh Provinsi (Sumatera Barat, Dki Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Gorontalo). Program keluarga Harapan mencakup ke tujuh Provinsi tersebut didasarkan atas sejumlah tingkat paling tinggi jumlah kondisi kemiskinan, gizi buruk, angka putus sekolah dan kesiapan dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sampai pada tahun 2014 program keluarga harapan sudah menyebar di 34 provinsi dengan 418 Kabupaten/Kota dan 4870 kecamatan.

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan maka pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Program Keluarga Harapan dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang

jaminan sosial. UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. UU No. 13 Tahun 2011 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi

Program keluarga harapan di Indonesia merupakan program nasional yang dikelola oleh kementrian Sosial dibantu oleh Dinas Sosial bagian Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta dibantu juga oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah. Peserta program keluarga harapan adalah rumah tangga sangat miskin yang memerlukan tenaga pendampingan. Pendamping program keluarga harapan direkrut oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan masyarakat penerima program dan membantu kelancaran program keluarga harapan. Menurut salah-satu Admin Program Keluarga Harapan Tahun 2009. Untuk membantu mensukseskan Program keluarga harapan Kementrian Sosial bekerja sama dengan konsultan Bank Dunia untuk memperluas bantuan Program Keluarga Harapan di Indonesia. Bank dunia memberikan bantuan pendanaan sebesar US$200 juta untuk mendukung upaya pemerintahan Indonesia dalam memperluas program bantuan sosialnya. Pembiayaan tersebut mendukung perluasan bantuan tunai bersyarat pemerintah melalui program keluarga harapan, penguatan sistem untuk mengimplementasikan

program, serta koordinasi yang lebih baik dengan program bantuan sosial pendukung lainya.

Tujuan Program Keluarga Harapan untuk membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin, meningkatkan kondisi sosial ekonomi, Meningkatkannya taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin, Meningkatkannya status kesehatan anak dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak dibawah 6 tahun dari Rumah Tangga Sangat Miskin, Meningkatnya akses kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Bagi penerima Program Keluarga Harapan, kewajiban yang harus dilakukan adalah menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi. Sasaran penerima Program Keluarga Harapan adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas, lansia, penyandang disabilitas dan berada pada lokasi terpilih.

Untuk itu pada kartu kepesertaan Program Keluarga Harapan akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu adanya petugas pendampingan Program Keluarga Harapan dari kantor Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) di kantor Kabupaten/Kota dan Kecamatan, agar operasional pelaksanaan Program Keluarga Harapan berjalan lancar dan sesuai seperti apa yang diharapkan. Manfaat yang diperoleh setelah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan adalah dalam jangka pendek, melalui pemberian bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin, program ini diharapkan dapat mengurangi beban Rumahh Tangga Sangat Miskin.

Sedangkan untuk jangka panjang, diharapkan akan menjadi perubahan pola pikir dan perilaku terhadap perbaikan status kesehatan anak-anak dan ibu hamil serta tingkat pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin tersebut sehingga rantai kemiskinan keluarga tersebut dapat diputus. (pedoman PKH, 2009)

Program keluarga harapan dialokasikan kedaerah-daerah yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan rekapitulasi bantuan sosial khusunya di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016- 2017 keluarga yang menerima bantuan Program keluarga harapan yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Barat

No	Jenis Bantuan	Penerima	Bantuan (Rp)
1	Program Keluarga Harapan Reguler	1. 633.876 keluarga	3.088.025.640.000
2	Program Keluarga Harapan Disabilitas	8.991 jiwa	17.982.000.000
3	Program Keluarga Harapan Lanjut Usia	13.173 jiwa	26.346.000.000

Sumber Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2016-2017

Dari tabel diatas Program Keluarga harapan disebar ke 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi jawa barat. Data untuk Program Keluarga Harapan di Kota Bandung khusunya reguler 37,687 dengan total bantuan 71, 228,430,000, data Program Keluarga Harapan disabilitas di kota bandung 462 dengan anggaran Rp. 924,000,000. Dan untuk Program Keluarga Harapan Lansia dikota Bandung total lansia 213 dengan anggaran Rp. 426,000,000 Data program kelurga harapan reguler untuk Kabupaten Bandung total keluarga penerima manfaat 77,928 total bantuan 147,283,920.000, data Program Kelurga Harapan disabilitas Kabupaten Bandung

total disabilitas 222 dan anggaran Rp. 444,000,000. Dan untuk program keluarga harapan Lansia Kabupaten Bandung total lansia 428 dengan anggaran 856,000,000 sedangkan untuk Kabupaten Bandung Barat Program Keluarga harapan reguler total keluarga penerima manfat yaitu 93,770 dengan total bantuan 177,283,920.000. Untuk program keluarga harapan Disabilitas Kabupaten Bandung Barat 435 dengan anggaran 870,000.000 dan untuk Program Keluarga Harapan Lansia di Kabupaten Bandung Barat total lansia 165 dengan anggaran 330,000,000.

Berdasarkan data bahwa yang paling banyak menerima bantuan program kelurga harapan di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung Barat. dan untuk jumlah data pernerima bantuan program kelurga harapan Kabupaten Bandung Barat pada setiap tahun nya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Rekapitulasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapam Kabupaten Bandung Barat

No	Tahun	Keluarga Penerima Msnfaat	Anggaran
1	2012	26.496 Keluarga	8 Milyyar
2	2013	24.510 Keluarga	41,5 milyar
3	2014	23. 966 Keluarga	42,8 Milyar
4	2015	43.405 Keluarga	56,8 Milyar

Sumber: Data Rekapitulasi KBB

Berdasarkan data dtatas bahwa Program Keluarga Harapan jika dilihat dari setiap tahunya jumlah kelurga penerima Bantuan terus meningkat dikarenakan Kabupaten Bandung Barat yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki berbagai kecamatan dengan penduduk yang padat. Kabupaten Bandung Barat memiliki 16 Kecamatan yaitu, Batujajar, Cipongkor, Rongga,

Cikalongwetan, Cisarua, Sindangkerta, Cihampelas, Gununghalu, Lembang, Cililin, Ngamprah, Saguling, Cipatat, Padalarang, Cipeundeuy dan Parongpong. Yang sebagian besar hanya berpenghasilan sebagai Petani, dan pemeras susu sapi. dan jika dilihat dari letak geografis wilayah Kabupaten Bandung Barat yang kurang menguntungkan untuk bercocok tanam yang dikarenakan banyak cekungan yang berbukit-bukit dan diderah tertentu sangat rawan dengan bencana alam. Hal ini lah salah satu yang membuat masyarakat penerima bantuan Kabupaten Bandung Barat setaip tahunya terus meningkat.

hasil dari data rekapitulasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2017 jumlah penerima bantuan kelurga penerima manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Rekapitulasi Penerima Bantuan Kabupaten Bandung Barat tahun 2016-2017

No	Nama kecamatan	Jumlah Kpm	Besar Bantuan	Jumlah Pendamping	Jumlah desa dan kelurahan
1	Cisarua	384	1.930.500.000	7	8
2	Sindang Kerta	184	971. 500.000	7	11
3	Batu Jajar	264	1.540.200.000	8	7
4	Cipongkor	164	870.100.000	5	14
5	Cililin	130	750.500.000	4	11
6	Ngamprah	320	1.730.500.000	8	11
7	Rongga	310	1.550.100.000	7	8
8	Cihampelas	210	1.230.200.000	6	11
9	Gunung haluh	360	1.770.500.000	8	9
10	Lembang	230	1.450.500.000	6	16
11	Saguling	210	1.230.200.000	4	6
12	Cipatat	240	1.360.500.000	6	12
13	Cikalong wetan	270	1.560.400.000	6	13
14	Padalarang	330	1.650.000.000.	8	10
15	Parongpong	240	1.360.500.000	7	7
16	Cipeundeuy	170	775.500.000	4	12

Sumber: Data rekapitulasi KBB, 2016-2017

Program Keluarga Harapan di Indonesia dilaksanakan pada tahun 2007 sedangkan untuk pelaksanaan Program keluarga harapan di Kabupaten Bandung Barat di mulai pada tahun 2012, sampai dengan saat ini program ini telah berjalan 7 tahun. Untuk Selama pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari hambatan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dari program ini. Adapun persoalan yang berkenaan dengan Program Keluarga Harapan selama ini, khusus nya di Kecamatan Cisarua yaitu dapat dilihat bahwa di kecamatan cisarua paling tinggi tingkat pemberian bantuannya atau dalam artian paling banyak keluarga yang dinilai rumah tangga sangat miskin dan juga dapat dilihat dari berbagai permasalahannya seperti berikut:

Pertama, mengenai data kelayakan peserta Program Keluarga Harapan yang masih belum tepat sasaran di Kecamatan Cisarua. Masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta Program Keluarga Harapan yang dinilai bukan Rumah Tangga Sangat Miskin, sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai Rumah Tangga Sangat Miskin tidak terdata atau tidak masuk calon peserta Program Keluarga Harapan. Artinya pendataan dan penentuan prioritas sasaran dari program ini belum tepat.

Kedua, mengenai jumlah bantuan yang diterima Kecamatan Cisarua. Masyarakat penerima program mengeluhkan adanya ketidak adilan dari jumlah uang yang diterima. Hal tersebut disebabkan besaran bantuan yang diterima disamaratakan khususnya untuk Program Keluarga Harapan Regluler kategori anak usia pendidikan. Kategori anak usia pendidikan mendapatkan jumlah uang yang sama dari tahap anak pra sekolah sampai Sekolah Menengah Pertama. Besaran

bantuan pada saat ini dari Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bandung Barat yaitu Rp.1.890.000.

Ketiga, mengenai penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai fungsinya di Kecamatan Cisarua. Bantuan yang diberikan pemerintah melalui Dinas Sosial dengan Program Keluarga Harapan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam hal ekonomi dengan memberikan bantuan berupa bantuan uang tunai sesuai kategori penerimanya, Pada kenyataanya uang yang diterima banyak disalahgunakan seperti uang bantuan untuk kategori usia anak sekolah dipergunakan untuk modal usaha atau kebutuhan lainnya.

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas mengenai Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cisarua masih adanya permasalahan yang dapat membuat program tersebut tidak efektif yang akan mengakibatkan tidak akan tercapainya tujuan dari Program Keluarga Harapan yang ingin membuat masyarakat menjadi sejahtera khususnya dalan bidang perekonomian.

Permasalahan pada Program Keluarga Harapan sudah banyak dikaji dalam berbagai penelitian dengan variabel yang beragam. Beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut diantaranya adalah penelitian yang disusun oleh Firma Kusuma Indrayani Mahasiswa Univeritas Negeri Surabaya (UNESA) yang di publikasikan dalam jurnal Publika volume 2 no 3 tahun 2014 yang berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan menggunakan teori dari Budiani (2007). Penelitian tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan

bagaimana keefektifan dan upaya yang telah dilakukan pemerintah kabupaten madiun dalam mengalokasikan dana tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa program keluarga harapan di Kabupaten Madiun belum maksimal karena masih belum efektifnya dalam mengalokasikan dana tunai kepada keluarga sangat miskin. Sedangkan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori Sedamaryanti. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung Barat khususnya di Kecamatan Cisarua. Persamaan dengan peneiti diatas secara garis besar yaitu membahas tentang keefektifan program secara alokasi dana sedangkan dalam penelitian ini membahas secara lebih mendalam yaitu kelayakan penerima, besaran dana bantuan yang diterima dan penggunaan dana yang diberikan oleh Program Keluarga Harapan tersebut.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Erkado, Afandi Firdaus, Elfemi dan Nilda, Universitas STKIP PGRI Sumatera Barat, yang di publikasikan dalam jurnal Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, volume 3 no 1 tahun 2014 dengan judul Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Nagari Lagan Hilir Kabupaten Pesisir Selatan. Peneliti ini menggunakan teori Gusnaidi (1998). Tujuan penelitian ini berfokus pada faktor dari dalam individu yaitu dari rumah tangga miskin penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan dalam pemanfaatan dana bantuan tersebut, metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe *deskriptif.* Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyaknya penyalahgunaan manfaat bantuan tunai yang diberikan serta penentuan sasaran belum tepat sasaran. Dibandingkan dengan penelitian

diatas penelitian yang dilakukan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat yang menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan teori dari Sedamaryanti, hampir memiliki fokus yang sama yaitu penggunaanya, tetapi penelitian ini mengkaji lebih dalam dari sisi lain seperti penerima bantuan yang kurang tepat dan jumlah dana yang merata, tidak sesuai kategori yang ditetapkan Program Keluarga Harapan tersebut.

Penelitian yang selanjutnya di tulis oleh Agunan P. Samosir yang dipublikasi oleh jurnal Borneo Administrasi volume 9 no 2 tahun 2013 yang berjudul Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2011. Peneliti ini menggunakan teori Duun (2000). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hasil tingkat efektivitas pelaksanaan PKH tahun 2011 dan bagaimana evaluasi pelaksanaan PKH sebagai bahan masukan dalam pemberian PKH pada tahun-tahun mendatang. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa masih belum efektifnya pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memberikan bantuan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin. Perbedaan dengan penelitian diatas dapat dilihat dari fokus penelitian yang hanya berfokus dengan efektivitas programnnya sedangkan penelitian ini berfokus kepada efektifitas Program Keluarga Harapan dan juga masyarakat penerima bantuan PKH dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dan teori Sedamaryanti. Yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat khususnya di Kecamatan Cisarua. Dari ketiga Penelitian terdahulu persamaan dengan Penelitian yang dilakukan oleh saya yaitu sama-sama membahas mengenai Efektivitas Program

Keluarga Harapan. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (Studi pada Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat khususnya di Kecamatan Cisarua dilihat dari kriteria *input*, proses produksi, hasil *(output)*, produktivitas?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat khususnya di Kecamatan Cisarua. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Input program keluarga harapan di Kecamatan Cisarua
2. Untuk mengetahui Proses produksi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua.
3. Untuk mengetahui hasil (*output*) Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua.
4. Untuk mengetahui produktivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisarua.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan yang bersifat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bidang ilmu pengetahuan khususnya teori efektivitas dan juga diharapkan dapat memberikan ilmu di bidang ilmu pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

   Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menghadapi masyarakat maupun aparatur pelaksana program keluarga harapan selama masa pembuatan Skripsi dan studi lapangan

2. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bahan informasi untuk masyarakat serta dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dalam bentuk saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat khususnya Dinas Sosial yang menyelenggarakan program keluarga harapan di Kecamatan Cisarua.

3. Bagi Lembaga

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya dalam bidang mengenai efektivitas. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait yaitu Dinas Sosial selaku penyelenggara program keluarga

harapan dan seluruh aparatur atau elemen masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.